KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN KERJA SAMA
BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA

NOMOR SOP	SEK-OT.02.02-206
TANGGAL PEMBUATAN	20 OKTOBER 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	3 NOVEMBER 2025
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP :	**PENETAPAN PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 625);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki pengetahuan terkait prosedur pembentukan dan perancangan peraturan perundang-undangan
2. Memiliki keahlian dalam analisis hukum atau perancangan peraturan perundang-undangan
3. Memiliki keahlian dalam penyusunan surat dan tata naskah dinas lainnya

KETERKAITAN:

1 SOP Pembuatan Surat
2 SOP Pelaksanaan Rapat
3 SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1 Komputer/Printer
2 Jaringan Internet
3 Jaringan Telekomunikasi
4 Tata Naskah Dinas
5 ATK

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Program Penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum tidak berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Menteri	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Hukerma	Kabag Hukum dan Kerja Sama	Ketua Tim	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginstruksikan Kabag Hukum dan Kerja Sama untuk menyiapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum			MULAI						Instruksi Kepala Biro Hukerma	
2	Menerima instruksi dan memberikan arahan kepada Ketua Tim untuk menyiapkan Perencanaan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum							Instruksi Kepala Biro Hukerma	30 menit	Arahan Kabag Hukum dan Kerja Sama	
3	Menerima arahan dan memerintahkan Anggota Tim untuk meminta dan mengumpulkan Usulan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dari Unit Eselon I dan menyusunnya ke dalam konsep Keputusan Menteri Hukum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum							Arahan Kabag Hukum dan Kerja Sama	30 menit	Arahan Ketua Tim	Permintaan Usulan Permenkum dalam Progsun diajukan melalui Surat Resmi Sekjen kepada Pimpinan UKE I dengan prosedur sesuai dengan SOP Pembuatan Surat
4	Menghimpun Usulan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dari Unit Eselon I dan menyusunnya menjadi konsep Keputusan Menteri Hukum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum							- Arahan Ketua Tim - Data Usulan Rancangan Peraturan Menteri dari Unit Eselon I	1 bulan	konsep Keputusan Menteri Hukum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum	
5	Mengkoreksi konsep Keputusan Menteri Hukum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum, selanjutnya memberikan arahan untuk mempersiapkan rapat pembahasan Keputusan Menteri tersebut					T Y		konsep Keputusan Menteri Hukum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum	30 menit	Arahan Ketua Tim	
5	Mengirimkan undangan rapat kepada Unit Eselon I dan mempersiapkan bahan rapat selanjutnya melaporkan kesiapan rapat kepada Ketua Tim							Arahan Ketua Tim	1 hari	undangan rapat, bahan dan kesiapan rapat	Surat undangan rapat ditandatangani Kepala Biro Hukerma dengan prosedur sesuai dengan SOP Pembuatan Surat
6	Memeriksa bahan dan kesiapan rapat, selanjutnya menyelenggarakan rapat pembahasan Keputusan Menteri Hukum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum, dan menyiapkan konsep Keputusan Menteri Hukum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum untuk diajukan kepada Menteri dan menyampaikan kepada Kabag Hukum dan Kerja Sama untuk dikoreksi							bahan dan kesiapan rapat	3 jam	- notula rapat - konsep nota dinas Sekjen - konsep Keputusan Menteri yang telah disetujui bersama	Rapat dengan mengundang para Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Ditjen PP dan dihadiri oleh perwakilan unit eselon I dengan Prosedur berdasarkan SOP Pelaksanaan Rapat
7	Memeriksa dan menyetujui konsep nota dinas Sekjen dan draf Keputusan Menteri Hukum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan menyampaikannya kepada Kepala Biro Hukerma				T Y			- konsep nota dinas Sekjen - konsep Keputusan Menteri yang telah disetujui bersama	30 menit	- konsep nota dinas Sekjen; dan - konsep Keputusan Menteri; yang telah disetujui Kabag Hukum dan Kerja Sama	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Menteri	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Hukerma	Kabag Hukum dan Kerja Sama	Ketua Tim	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Memeriksa dan menyetujui konsep nota dinas Sekjen dan draf Keputusan Menteri Hukum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal							- konsep nota dinas Sekjen; dan - konsep Keputusan Menteri; yang telah disetujui Kabag Hukum dan Kerja Sama	30 menit	- konsep nota dinas Sekjen; dan - konsep Keputusan Menteri; yang telah disetujui Kepala Biro Hukerma	
9	Memeriksa, menyetujui dan menandatangani nota dinas dan memaraf draf Keputusan Menteri Hukum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan menyampaikannya kepada Menteri							- konsep nota dinas Sekjen; dan - konsep Keputusan Menteri; yang telah disetujui Kepala Biro Hukerma	30 menit	- nota dinas yang telah ditandatangani; dan - konsep Keputusan Menteri yang telah diparaf Sekjen	
10	Menyetujui dan menandatangani Keputusan Menteri Hukum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum							- nota dinas yang telah ditandatangani; dan - konsep Keputusan Menteri yang telah diparaf Sekjen	30 menit	Keputusan Menteri Hukum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum	

